

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme penelitian hukum empiris & normatif*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Handajaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- K.J. Santoso. 2014. *Lebih memahami standar operasional prosedur (SOP)*. Kata Pena: Surabaya.
- Lopa, Baharuddin. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal hukum suatu pengantar*. Liberty: Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Rohayati, Rita. 2005. *Bahasa dan sastra Indonesia*. PT Setia Purna Inves: Tanjung Barat Jakarta Selatan.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Siagian, P. Sondang . 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Pengantar ilmu hukum*. UII-Press: Jakarta.
- Sudriamunawar Haryono. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono. 2016. *Metode kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2007. *Analisis kebijakan public panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeda: Bandung.
- Suryabrata, Sumadi. 1989. *Metedologi penelitian sosial*. CV Rajawali: Jakarta.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran RI Nomor 5475. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran RI Nomor 5495.

Indonesia. *Undang-Undang Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagai Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah* ( Lembaran Negara Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826).

## Internet dan Sumber Lainnya

Aditya, Rifan. 2021, September 2. *Pengertian Implementasi dan Tujuan Serta Contoh Implementasi*. Suara.com. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya?page=all>.

Agrina Yulita. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*. *Skripsi*, tidak diterbitkan. Kampar: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ismawati, Any, pengaruh budaya hukum terhadap pembangunan hukum di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 6. No 1., 2011.

Irfan, M, *Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima (Studi Kasus Di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bima)*, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 7. No 1., 2010.

Kartini Deliana Padang. 2017. *Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Dairi*. *Tesis*, tidak diterbitkan. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Kertapradja, E. Koswara. *Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada Forum Democratic Reform Support Program. 5 November 2007.

Kurniawan, Aris. 2021, November 2021. *Pengertian Administrasi*. Guru Pendidikan. Diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-administrasi>.

- Pradistya, Reyvan Maulid, 10 Februar 2021, Teknik Trigulasi Dalam Pengelolaan Data Kualitatif, <https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>, 9 April 2022.
- Prafitasari, Ardina dan Ferida Asih Wiludjeng. 2016. *Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi. Kajian Komunikasi dan Studi Media*. 4(2)
- Made, I. Sudiadnyane, implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mongondow utara, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5. No 78., 2019.
- Murti, Wisnu, melihat berbagai sistem hukum di dunia dalam kajian pengantar ilmu hukum, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 4. No 3., 2021.
- Reza Muhammad. 2017. "Sistem Hukum". Metro Kaltara. 6 November. Diakses pada 22 Februari 2022. <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>.
- Reza Nofriandi. 2016. Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/1/1/227/2016 tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-disiplin) di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Langsa. *Tesis*, tidak diterbitkan. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Salim, Ahmad dan Burham Pranawa. 2018. *Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang*. *Jurnal Bedah Hukum*. 2(1)
- Wibosono Anton. 2019. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 22 Februari 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.